

Jurnal **IDENTITAS**

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK dan Refleksi Jelang 20 Tahun Implementasi UU Kewarganegaraan
Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak atas Kewarganegaraan
Nursyahbani Katjasungkana

Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia:
Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan
dan Prinsip Evolving Capacities dalam Konvensi Hak Anak
Arlene Eleanor

Literasi Kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Indonesia: Melampaui Pendekatan Legal-Formal
Dharmadana Zhou

Kerelawanan, CSR, dan Kewarganegaraan Partisipatif:
Pengalaman Relawan Perempuan Tzu Chi Cabang Sinar Mas di Wilayah Terpencil
Widodo

Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia:
Analisis Indeks Pembangunan Pemuda
pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA)
Adi Kurniawan

Resensi Buku:
Kewarganegaraan untuk Semua?
Meninjau Perspektif Disabilitas dalam Buku Ajar PKn Perguruan Tinggi
Kikin P Tarigan

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH
Universitas Diponegoro, Semarang

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain & Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i
- Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK1 dan Refleksi Jelang 20 Tahun
Implementasi UU Kewarganegaraan
Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak
atas Kewarganegaraan
Nursyahbani Katjasungkana 1
- Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia:
Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan
dan Prinsip Evolving Capacities dalam Konvensi Hak Anak
Arlene Eleanor 37
- Literasi Kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Perguruan Tinggi Indonesia: Melampaui Pendekatan Legal-Formal
Dharmadana Zhou 54
- Kerelawanan, CSR, dan Kewarganegaraan Partisipatif:
Pengalaman Relawan Perempuan Tzu Chi Cabang Sinar Mas
di Wilayah Terpencil
Widodo 74
- Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia:
Analisis Indeks Pembangunan Pemuda
pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA)
Adi Kurniawan 108
- Resensi Buku:
Kewarganegaraan untuk Semua?
Meninjau Perspektif Disabilitas dalam Buku Ajar PKn Perguruan Tinggi
Kikin P Tarigan 144
- Panduan Penulisan Naskah 149
- Tentang Penulis 152

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia:

Analisis Indeks Pembangunan Pemuda
pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA)¹

Adi Kurniawan

Institut Nagarjuna
laskardhamma@gmail.com



Received : 19 July 2025
Revised : 07 Augustus 2025
Revised : 26 Augustus 2025
Accepted : 29 Augustus 2025
Published : 30 September 2025

ABSTRACT

This study examines the youth development conditions of Theravada Buddhist youth in Indonesia and their implications for citizenship capacity, using Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) as a case study. It employs a quantitative descriptive-analytical design through a secondary analysis of survey data collected in 2013–2014 from 211 respondents across 19 provinces. Descriptive statistics and one-way ANOVA were applied to 53 indicators grouped into eight youth development domains.

The findings show that PATRIA's overall youth development index score was 73.3 on a 0–100 scale, placing it in the “high” category. Education and access to information media recorded the highest scores, both at 76.6, while self-potential, employment, and youth relationships recorded the lowest scores, each at 60. The ANOVA results indicate statistically significant differences across provinces in all domains ($p < 0.05$). The youth participation domain scored 73.3; however, the original study identified political participation as the indicator that most constrained this domain, while PATRIA's activities during the study period were more focused on socio-religious activities.

These findings demonstrate that youth development outcomes cannot be treated directly as measures of citizenship. This study conceptualizes youth development as a set of enabling conditions for citizenship capacity. The uneven actualization of capacities and participation across different domains

¹ Artikel ini dikembangkan dari sebagian data tesis penulis berjudul Analisis Indeks Pembangunan Pemuda Theravada Indonesia (Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia), yang diselesaikan pada Juli 2014. Data tersebut diolah kembali menggunakan kerangka analisis, fokus konseptual, dan tujuan penelitian yang berbeda, sehingga menghasilkan kontribusi akademik baru.

is interpreted as a pattern of “selective citizenship,” without assuming a causal relationship between youth development conditions and citizenship practices. The study therefore demonstrates both the potential and limitations of using a youth development index to examine the citizenship capacity of religious minority youth.

Keywords: youth development index; citizenship capacity; selective citizenship; Theravada Buddhist youth; PATRIA.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada di Indonesia dan implikasinya terhadap kapasitas kewarganegaraan, dengan mengambil Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif-analitis melalui analisis sekunder atas data survei terhadap 211 responden di 19 provinsi yang dikumpulkan pada 2013–2014. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan one-way ANOVA terhadap 53 indikator yang dikelompokkan ke dalam delapan domain pembangunan pemuda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan pemuda PATRIA mencapai 73,3 pada skala 0–100 dan termasuk kategori tinggi. Pendidikan dan akses media informasi memperoleh skor tertinggi, masing-masing 76,6, sedangkan potensi diri, tenaga kerja, dan hubungan pemuda memperoleh skor terendah, masing-masing 60. Uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antarprovinsi pada seluruh domain ($p < 0,05$). Domain partisipasi pemuda mencapai skor 73,3, tetapi penelitian awal mengidentifikasi partisipasi politik sebagai indikator yang paling membatasi capaian domain tersebut, sementara aktivitas PATRIA pada periode penelitian lebih berfokus pada kegiatan sosial-keagamaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan pemuda tidak dapat secara langsung diperlakukan sebagai ukuran kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, pembangunan pemuda dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan (enabling conditions) terbentuknya kapasitas kewarganegaraan. Ketidakmerataan aktualisasi kapasitas dan keterlibatan pada berbagai ranah dibaca sebagai pola “kewarganegaraan selektif”, tanpa mengasumsikan hubungan kausal antara kondisi pembangunan pemuda dan praktik kewarganegaraan. Penelitian ini menunjukkan potensi sekaligus keterbatasan penggunaan indeks pembangunan pemuda untuk membaca kapasitas kewarganegaraan pemuda minoritas agama.

Kata kunci: indeks pembangunan pemuda; kapasitas kewarganegaraan; kewarganegaraan selektif; pemuda Buddhis Theravada; PATRIA..

Pendahuluan

Dalam kajian kewarganegaraan kontemporer, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum yang melekat pada individu, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan warga untuk menikmati hak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Isin & Turner, 2007). Perspektif ini menjadi penting dalam masyarakat multikultural karena kesetaraan status hukum tidak selalu diikuti oleh kemampuan menikmati hak dan mengakses ruang publik secara setara.

Dalam konteks masyarakat multikultural, perspektif ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pengalaman kelompok minoritas, yang dapat menghadapi keterbatasan partisipasi, invisibilitas politik, serta kebutuhan untuk menegosiasikan praktik kewarganegaraan dalam situasi ketidaksetaraan struktural. Pengalaman komunitas Ahmadiyah di Tasikmalaya misalnya, menunjukkan bahwa pengakuan legal tidak dengan sendirinya menghilangkan proses minoritisasi dan kerentanan pelanggaran hak (Mursyidi, Bagir & Maarif, 2020).

Sementara penelitian lain di Pasaman Barat dan Dharmasraya menunjukkan bahwa kelompok minoritas agama menghadapi persoalan dalam pendirian rumah ibadah dan kebijakan lokal yang dapat berdampak perlakuan diskriminatif (Burhanuddin, Nurdin & Helmi, 2019). Pengalaman tersebut memperlihatkan kemungkinan terjadinya kesenjangan antara kewarganegaraan sebagai status formal dan kewarganegaraan sebagaimana dialami dalam kehidupan sosial dan ruang publik.

Persoalan kewarganegaraan kelompok minoritas tersebut memperoleh dimensi tersendiri ketika dikaitkan dengan generasi muda. Pemuda tidak hanya tumbuh sebagai warga negara, tetapi juga membentuk identitas sosial, keagamaan, dan orientasi kewarganegaraannya di tengah struktur sosial tempat mereka hidup. Bagi pemuda dari kelompok agama minoritas, proses tersebut berlangsung bersamaan dengan pengalaman menjadi bagian dari komunitas keagamaan yang menempati posisi minoritas dalam masyarakat. Karena itu, masa muda menjadi periode penting untuk melihat bagaimana identitas, kebermilikan, dan orientasi terhadap kehidupan sosial dan politik terbentuk (Wood, 2014). Dari perspektif perkembangan, periode akhir remaja hingga usia dua puluhan juga ditandai oleh eksplorasi identitas dan proses menuju peran dewasa yang lebih mapan (Arnett, 2019).

Di Indonesia, posisi pemuda secara normatif ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menempatkan pemuda dalam peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dengan

demikian, pemuda dapat dilihat bukan hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga sebagai warga yang memiliki kapasitas dan ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Secara teoretis, literatur mengenai pemuda dan kewarganegaraan menempatkan masa muda sebagai fase penting dalam pembentukan identitas dan orientasi kewarganegaraan, ketika individu mulai menegosiasikan posisi, hak, dan perannya dalam kehidupan publik (Hoskins & Janmohamed, 2015; Wood, 2014). Posisi tersebut menjadikan pemuda sebagai subjek yang relevan untuk mengkaji kewarganegaraan substantif, yakni kewarganegaraan yang tidak berhenti pada kepemilikan status hukum sebagai warga negara, tetapi berkaitan dengan sejauhmana warga dapat menikmati hak, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta mengalami pengakuan dan kepemilikan dalam komunitas politik (Marshall, 1992; Isin & Turner, 2002; Henrard, 2013).

Namun, meskipun kerangka normatif tersebut relatif kuat, kajian empiris mengenai bagaimana kewarganegaraan pemuda dibentuk dan dipraktikkan masih banyak menggunakan pendekatan makro pembangunan pemuda. Sebagian penelitian berfokus pada indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan (BPS, 2012; UNDP, 2013), sementara dimensi kewarganegaraan sebagai praktik sosial, termasuk partisipasi komunitas, relasi lintas kelompok, belum memperoleh perhatian yang sebanding.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memetakan kondisi pemuda adalah Youth Development Index (YDI), yang dikembangkan oleh The Commonwealth Secretariat pada tahun 2013. YDI merupakan indeks komposit yang dirancang untuk mengukur perkembangan pemuda melalui sejumlah domain yang berkaitan dengan kondisi dan peluang kaum muda dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Instrumen ini ditujukan untuk menyediakan basis data yang dapat digunakan dalam pemantauan dan perumusan kebijakan pembangunan pemuda (The Commonwealth, 2013). Dalam perkembangannya, metodologi YDI terus diperbarui dan cakupan pengukurannya diperluas. *Global Youth Development Index Update Report 2023* mencakup 183 negara, sementara pada tingkat regional pendekatan serupa dikembangkan melalui *ASEAN Youth Development Index*. Sementara di Indonesia, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mulai dikembangkan pada 2015 dan digunakan untuk memantau pembangunan pemuda secara nasional. Pendekatan indeks memungkinkan kondisi pembangunan pemuda dipetakan secara multidimensional dan variasinya dibandingkan antardomain maupun antarwilayah.

Namun, indeks pembangunan pemuda tidak dirancang sebagai ukuran langsung kewarganegaraan. Pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, relasi sosial, akses informasi, dan partisipasi menggambarkan kondisi serta sumber daya yang dapat menopang perkembangan pemuda, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bagaimana kapasitas tersebut diwujudkan dalam penggunaan hak dan keterlibatan dalam kehidupan publik. Karena itu, penelitian ini memosisikan pembangunan pemuda sebagai kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) terbentuknya kapasitas kewarganegaraan, bukan sebagai ukuran kewarganegaraan itu sendiri. Perbedaan konseptual ini akan dielaborasi lebih lanjut dalam kerangka konseptual penelitian.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan bagi pemuda dari kelompok minoritas agama. Literatur kewarganegaraan multikultural menunjukkan bahwa kesamaan status formal tidak selalu menghasilkan kesetaraan dalam akses terhadap hak dan ruang partisipasi (Kymlicka, 1995; Yuval-Davis, 2011). Pada saat yang sama, organisasi kepemudaan berbasis agama dapat menyediakan ruang bagi pembentukan relasi sosial, pengalaman berorganisasi, dan partisipasi sosial-keagamaan. Hubungan antara kondisi pembangunan pemuda, kehidupan organisasi keagamaan, dan aktualisasi kapasitas kewarganegaraan karena itu menjadi persoalan empiris yang perlu ditelaah, bukan diasumsikan sejak awal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan hubungan antara agama, identitas pemuda, dan praktik kewarganegaraan. Grundel dan Maliepaard (2012) mengkaji hubungan religiositas dengan kompetensi kewarganegaraan demokratis pada remaja Muslim, Kristen, dan nonreligius di Belanda. Harris dan Lam (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan keagamaan pemuda Muslim dan Buddhis dapat berkelindan dengan partisipasi sipil dan politik. Dalam konteks Indonesia, Laksana dan Wood (2019), melalui konsep *lived religious citizenship*, memperlihatkan bagaimana pemuda dari latar agama berbeda menegosiasikan keberagaman agama dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Cufurovic dan Ozalp (2021) menunjukkan keterkaitan antara agama, kepemilikan, dan keterlibatan sipil dalam pembentukan *active citizenship* pemuda Muslim. Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa kewarganegaraan pemuda tidak hanya berkaitan dengan status formal, tetapi juga dengan kapasitas untuk menggunakan sumber daya dan kesempatan yang tersedia dalam membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut dibaca melalui konsep Kapasitas kewarganegaraan (*citizenship capabilities*), yakni kemampuan untuk mengonversi sumber daya dan

kesempatan menjadi tindakan dan partisipasi sebagai warga (Sen, 1999; Lister, 2007; Pfister, 2012).

Dalam konteks ini, organisasi kepemudaan berbasis agama menjadi arena sosial yang penting namun relatif kurang dieksplorasi secara akademik. Di satu sisi, organisasi keagamaan sering dipahami sebagai ruang privat yang berfokus pada pembinaan moral dan spiritual. Di sisi lain, sejumlah studi menunjukkan bahwa organisasi semacam ini juga berfungsi sebagai *school of citizenship*, tempat nilai, etika kolektif, dan kapasitas sipil dibentuk melalui praktik sosial sehari-hari (Putnam, 2000; Fuller et al., 2013). Ketegangan antara penguatan identitas internal dan keterlibatan dalam ruang publik inilah yang menjadikan organisasi kepemudaan berbasis agama sebagai *locus* yang relevan untuk mengamati hubungan antara penguatan identitas internal dan keterlibatan dalam ruang publik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan hubungan antara agama, identitas pemuda, dan praktik kewarganegaraan. Grundel dan Maliepaard (2012) mengkaji hubungan religiositas dengan kompetensi kewarganegaraan demokratis pada remaja Muslim, Kristen, dan nonreligius di Belanda. Harris dan Lam (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan keagamaan pemuda Muslim dan Buddhis dapat berkelindan dengan partisipasi sipil dan politik. Dalam konteks Indonesia, Laksana dan Wood (2019), melalui konsep *lived religious citizenship*, memperlihatkan bagaimana pemuda dari latar agama berbeda menegosiasikan keberagaman agama dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Cufurovic dan Ozalp (2021) menunjukkan keterkaitan antara agama, kebermilikan, dan keterlibatan sipil dalam pembentukan *active citizenship* pemuda Muslim.

Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa agama dan posisi sosial merupakan dimensi penting dalam pengalaman kewarganegaraan pemuda. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada identitas, religiositas, kompetensi kewarganegaraan, atau pengalaman partisipasi tertentu. Penelitian yang menghubungkan secara sistematis kondisi pembangunan pemuda dari kelompok minoritas agama dengan kapasitas dan variasi keterlibatan kewarganegaraan mereka masih terbatas. Kesenjangan inilah yang hendak diisi penelitian ini melalui kajian terhadap pemuda Buddhis Theravada yang tergabung dalam PATRIA, dengan menghubungkan kondisi pembangunan anggota organisasi, yang diukur secara multidimensional dengan kapasitas dan keterlibatan kewarganegaraan.

Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA), sebagai organisasi kepemudaan Buddhis Theravada tingkat nasional dengan anggota yang tersebar di berbagai

provinsi, menyediakan konteks empiris untuk mengkaji persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan data pembangunan pemuda anggota PATRIA untuk menganalisis kondisi pembangunan mereka dan kemudian membaca implikasinya terhadap kapasitas kewarganegaraan. Indeks pembangunan pemuda tidak diperlakukan sebagai skor kewarganegaraan, melainkan sebagai perangkat untuk memetakan kondisi yang dapat menyediakan atau membatasi kapasitas bagi praktik kewarganegaraan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, untuk menjembatani studi pembangunan pemuda dan studi kewarganegaraan, penelitian ini menggunakan konsep kapasitas kewarganegaraan (*citizenship capabilities*) untuk membedakan antara kondisi dan sumber daya yang tersedia bagi pemuda agama minoritas dengan kemampuan untuk mengaktualisasikannya dalam tindakan sebagai warga negara. Dalam pengertian ini, indeks pembangunan pemuda tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung kualitas kewarganegaraan, melainkan digunakan untuk memetakan kondisi yang dapat menopang atau membatasi kapasitas kewarganegaraan. Implikasinya terhadap kewarganegaraan kemudian dibaca melalui pola keterlibatan pemuda dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, kondisi pembangunan yang relatif baik tidak dengan sendirinya diperlakukan sebagai bukti kuatnya praktik kewarganegaraan, tetapi sebagai kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) terbentuk dan teraktualisasinya kapasitas kewarganegaraan.

Dengan mengadaptasi kerangka YDI dan mengaitkannya dengan kedua perspektif kewarganegaraan sosial dan kewarganegaraan aktif, penelitian ini mengkaji bagaimana kondisi pembangunan pemuda dari kelompok minoritas agama berhubungan dengan kapasitas dan keterlibatan mereka dalam berbagai ranah kehidupan publik. Perbedaan capaian antarranah digunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan munculnya pola kewarganegaraan selektif, yakni kondisi ketika kapasitas dan keterlibatan kewarganegaraan berkembang relatif kuat dalam ranah sosial-moral dan kohesi komunitas, tetapi lebih terbatas dalam ranah politik-deliberatif dan artikulasi kepentingan publik.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada yang tergabung dalam PATRIA melalui delapan domain indeks pembangunan pemuda; (2) menganalisis variasi regional dalam capaian indeks tersebut; dan (3) mendiskusikan implikasi temuan empiris terhadap pemahaman kewarganegaraan pemuda agama minoritas di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini mencakup tiga aspek. Pertama, secara empiris, penelitian menyediakan data kuantitatif mengenai kondisi pemuda dari kelompok

minoritas agama yang masih relatif jarang tersedia dalam skala nasional. Kedua, secara metodologis, penelitian mengeksplorasi penggunaan indeks pembangunan pemuda secara terbatas untuk membaca kondisi yang berkaitan dengan kapasitas kewarganegaraan sekaligus menunjukkan keterbatasannya dalam menangkap dimensi kewarganegaraan secara penuh. Ketiga, secara teoretis, penelitian menghubungkan pembangunan pemuda dengan persoalan kewarganegaraan pemuda agama minoritas dengan menelaah bagaimana kondisi pembangunan dan kapasitas partisipatif dapat teraktualisasi secara berbeda pada berbagai ranah kehidupan sosial dan politik.

Dengan demikian, artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian normatif terhadap PATRIA sebagai organisasi ataupun menganggap indeks pembangunan pemuda sebagai ukuran kualitas kewarganegaraan. PATRIA digunakan sebagai konteks empiris untuk memahami hubungan antara pembangunan pemuda, kapasitas kewarganegaraan, dan posisi pemuda minoritas agama dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Kerangka Analitis Penelitian

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini mengaitkan pembangunan pemuda dengan dua tradisi utama dalam teori kewarganegaraan. Tradisi liberal menempatkan hak individual sebagai unsur penting kewarganegaraan. Dalam konsepsi Marshall (1950), kewarganegaraan mencakup hak sipil, politik, dan sosial yang menopang kesetaraan status warga. Konsep Kewarganegaraan sosial ala Marshall terutama menegaskan pentingnya hak sosial agar status kewarganegaraan dapat dinikmati secara substantif, tidak berhenti pada pengakuan formal semata. Perspektif ini penting untuk menjelaskan dimensi hak dan akses yang dimiliki warga. Sementara itu, tradisi republikan memberikan penekanan lebih kuat pada partisipasi aktif dalam urusan publik dan civic virtue sebagai bagian penting kewarganegaraan (Pettit, 1997; Honohan, 2002). Dalam perspektif ini, warga tidak hanya dipahami sebagai pemegang hak, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam kehidupan bersama. Kewarganegaraan aktif dengan demikian menggeser perhatian dari sekadar kepemilikan hak menuju penggunaan hak dan keterlibatan warga dalam kehidupan publik. Penekanan pada keterlibatan warga inilah yang menjadi dasar bagi pemahaman kewarganegaraan aktif (*active citizenship*), yakni kewarganegaraan yang tidak berhenti pada kepemilikan hak, tetapi diwujudkan melalui penggunaan hak dan keterlibatan dalam kehidupan publik atau partisipasi.

Salah satu dimensi kewarganegaraan aktif tersebut dapat dilihat melalui partisipasi politik. Huntington & Nelson (1990) merumuskan partisipasi politik

sebagai aktivitas warga yang diarahkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Penekanannya terletak pada tindakan warga, bukan semata pada kepemilikan hak politik atau sikap terhadap politik. Huntington dan Nelson juga membedakan partisipasi yang tumbuh dari inisiatif warga (*autonomous participation*) dan partisipasi yang digerakkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberadaan hak dan kesempatan politik belum dengan sendirinya menunjukkan tingkat keterlibatan warga. Hal yang juga penting adalah bagaimana warga menggunakan kesempatan tersebut dalam praktik.

Berdasarkan landasan teoretis yang telah diuraikan, penelitian ini memosisikan pembangunan pemuda sebagai *enabling condition* bagi kapasitas dan praktik kewarganegaraan, bukan sebagai padanan langsung dari kewarganegaraan itu sendiri. Dalam kerangka ini, pembangunan pemuda dipahami sebagai himpunan kondisi individual, sosial, dan struktural yang dapat menyediakan sumber daya dan peluang bagi pemuda untuk menggunakan hak dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan kapabilitas yang membedakan antara ketersediaan sumber daya dan peluang, dengan kemampuan individu untuk mengonversinya menjadi tindakan yang bernilai (Sen, 1999; Pfister, 2012).

Pembedaan tersebut penting karena kondisi pembangunan yang relatif baik tidak secara otomatis menghasilkan keterlibatan kewarganegaraan yang kuat. Pendidikan, jaringan sosial, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan lingkungan sosial dapat menyediakan kondisi yang mendukung keterlibatan warga, tetapi aktualisasinya tetap dipengaruhi oleh kemampuan dan kesempatan warga untuk menggunakan sumber daya tersebut dalam kehidupan sosial dan politik. Literatur mengenai partisipasi warga juga menunjukkan bahwa pendidikan, jaringan sosial, dan kepercayaan sosial dapat memfasilitasi keterlibatan dalam kehidupan publik tanpa secara deterministik menghasilkan partisipasi kewarganegaraan (Putnam, 2000; Hoskins & Mascherini, 2009).

Dalam kerangka tersebut, YDI digunakan untuk memetakan kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada yang tergabung PATRIA melalui delapan domain yang dianalisis dalam penelitian. Hasil pengukuran tersebut kemudian dibaca melalui perspektif kewarganegaraan untuk mengidentifikasi kondisi dapat menopang atau membatasi kapasitas bagi penggunaan hak dan keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik. Penggunaan indeks dilakukan dengan kesadaran bahwa sejumlah dimensi kewarganegaraan—seperti artikulasi

klaim hak, advokasi kebijakan publik, dan negosiasi kepentingan dalam ruang politik—tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui instrumen tersebut. Oleh karena itu, YDI tetap diperlakukan sebagai instrumen pembangunan pemuda, bukan sebagai proksi atau ukuran kapasitas kewarganegaraan.

Dengan pendekatan tersebut, analisis penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada yang tergabung dalam PATRIA berdasarkan delapan domain yang diukur dalam penelitian. Kedua, bagaimana pola capaian pembangunan pemuda tersebut dapat dibaca dalam kaitannya dengan kondisi yang menopang atau membatasi kapasitas dan keterlibatan kewarganegaraan pemuda minoritas agama.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan analisis sekunder terhadap data survei. Data penelitian berasal dari survei nasional terhadap anggota PATRIA yang dilaksanakan pada Agustus 2013-Maret 2014. Survei tersebut merupakan data primer yang dikumpulkan penulis dalam penelitian tesis untuk memetakan kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada yang tergabung dalam PATRIA. Survei tersebut bukan merupakan survei periodik, dan hingga saat ini tidak tersedia data survei lain dengan cakupan dan instrumen yang sama.

Dalam artikel ini, data tersebut dianalisis kembali menggunakan kerangka konseptual yang berbeda dari penelitian awal. Instrumen asli dikembangkan untuk mengukur pembangunan pemuda dan tidak dirancang sebagai instrumen pengukuran kewarganegaraan. Namun, sejumlah indikator di dalamnya, terutama partisipasi politik, kepemimpinan organisasi, partisipasi sosial-kemasyarakatan, partisipasi sosial-keagamaan, serta hubungan sosial, memiliki keterkaitan konseptual dengan dimensi partisipatif kewarganegaraan. Oleh karena itu, artikel ini tidak memperlakukan skor YDI sebagai ukuran langsung kewarganegaraan, tetapi menggunakan pola capaian antardomain sebagai dasar empiris untuk mendiskusikan kondisi yang dapat menopang atau membatasi kapasitas kewarganegaraan pemuda agama minoritas.

Penggunaan data 2013–2014 membawa keterbatasan temporal yang perlu diperhitungkan. Data tersebut tidak digunakan untuk merepresentasikan kondisi aktual anggota PATRIA, melainkan sebagai data historis mengenai kondisi pembangunan pemuda dalam organisasi keagamaan minoritas pada periode survei. Nilai analitis data terletak pada cakupannya yang menjangkau anggota

PATRIA di berbagai wilayah Indonesia dan pada ketersediaan sejumlah indikator pembangunan pemuda yang memungkinkan data tersebut dianalisis kembali melalui perspektif kewarganegaraan.

Relevansi analisis data tersebut juga dapat ditempatkan dalam perkembangan pengukuran pembangunan pemuda di Indonesia. Pemerintah Indonesia sejak 2015 mengembangkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai instrumen untuk memantau pembangunan pemuda secara nasional. Dalam perkembangannya hingga saat ini, IPP tetap menempatkan partisipasi dan kepemimpinan sebagai salah satu domain pembangunan pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tetap menjadi salah satu dimensi yang diperhatikan dalam pembangunan pemuda di Indonesia. Namun, penelitian ini tidak membandingkan secara langsung hasil survei PATRIA 2013–2014 dengan IPP nasional terbaru karena terdapat perbedaan populasi, instrumen, indikator, dan metodologi pengukuran.

Desain ini digunakan untuk memetakan kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada berdasarkan data survei tersebut dan menganalisisnya melalui perspektif kapasitas kewarganegaraan pemuda minoritas agama. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal, menggambarkan kondisi PATRIA saat ini, maupun melakukan generalisasi terhadap seluruh pemuda Buddhis atau pemuda Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini menyediakan data historis mengenai kondisi pembangunan pemuda minoritas agama pada periode survei yang memungkinkan pembacaan kembali melalui perspektif kewarganegaraan.

Populasi dan Teknik Sampling

Populasi penelitian mencakup seluruh anggota aktif PATRIA pada periode survei 2013–2014, yang berjumlah sekitar 2.100 orang dan tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Penentuan ukuran sampel mengacu pada tabel penentuan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian survei sosial (Sugiyono, 2010) dengan tingkat kesalahan sebesar 10 persen, sehingga diperoleh ukuran sampel minimum sebanyak 238 responden.

Teknik sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling*, dengan provinsi sebagai strata utama. Sampel dialokasikan secara proporsional untuk menangkap variasi regional sekaligus mencegah dominasi wilayah tertentu dalam komposisi sampel. Sebanyak 238 kuisioner didistribusikan sesuai dengan target sampel, dari jumlah tersebut sebanyak 211 kuisioner kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis, sehingga tingkat respons penelitian mencapai 88,7 persen.

Penelitian ini tidak melibatkan kelompok pembanding, seperti pemuda non-PATRIA atau pemuda dari kelompok agama lain. Oleh karena itu, hasil penelitian

tidak dimaksudkan untuk membandingkan kondisi pembangunan maupun kapasitas kewarganegaraan antarkelompok, melainkan untuk menganalisis variasi internal kondisi pembangunan pemuda dalam suatu organisasi pemuda keagamaan minoritas.

Instrumen Penelitian dan Indikator

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang dikembangkan dengan mengadaptasi kerangka YDI Malaysia dan Commonwealth (Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, 2011; The Commonwealth, 2013), serta disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia dan temuan studi Supriyanto (2009). Instrumen terdiri atas 53 indikator yang dikelompokkan ke dalam delapan domain pembangunan pemuda. Penyesuaian dilakukan terhadap sejumlah indikator agar sesuai dengan karakteristik pemuda Buddhis yang tergabung dalam PATRIA. Misalnya, pada domain pendidikan ditambahkan indikator pendidikan keagamaan serta pelatihan atau seminar, sedangkan akses media dan informasi ditempatkan sebagai domain tersendiri. Rincian delapan domain dan 53 indikator hasil penyesuaian yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Domain dan Indikator Indeks Pembangunan Pemuda PATRIA

Domain	Indikator Utama
Potensi diri	1. Patriotisme; 2. Daya saing.
Pendidikan	2. Melek huruf; 4. Rata-rata lama sekolah/wajib belajar 9 tahun; 5. Aktivitas membaca/rasio membaca; . Tingkat pendidikan pemuda; 7. Pelatihan dan seminar; 8. Pendidikan keagamaan.
Penyimpangan	9. Tidak merokok; 10. Tidak minum alkohol; 11. Tidak kebut-kebutan/ugal-ugalan/melanggar rambu-rambu di jalan raya; 12. Tidak merusak fasilitas umum/corat-corek; 13. Tidak berjudi; 14. Tidak mengakses pornografi; 15. Tidak seks bebas; 16. Tidak keluyuran; 17. Tidak menggunakan NAPZA; 18. Tidak membuang sampah sembarangan; 19. Tidak tawuran (kriminal); 20. Tidak berdusta; 21. Tidak mencuri.
Tenaga kerja	22. Jumlah pemuda menganggur; 23. Rasio pekerja muda dari jumlah populasi pemuda; 24. Kewirausahaan.
Hubungan pemuda	25. Hubungan dengan orangtua; 26. Hubungan dengan masyarakat; 27. Hubungan dengan teman.

Partisipasi pemuda	28. Partisipasi organisasi/kepemimpinan; 29. Partisipasi politik; 30. Partisipasi sosial keagamaan; 31. Partisipasi sosial-kemasyarakatan.
Kesehatan	32. Tidak memiliki tekanan darah tidak normal; 33. Tidak mengidap kanker; 34. Tidak mengidap gangguan jantung; 35. Tidak mengidap gangguan ginjal; 36. Tidak mengidap asma; 37. Tidak mengidap HIV/AIDS; 38. Tidak obesitas; 39. Tidak insomnia; 40. Tidak diabetes; 41. Tidak mengidap gangguan hati; 42. Tidak mengidap gangguan lambung; 43. Tidak mengidap penyakit kelamin menular; 44. Tidak mengidap penyakit menular lainnya; 45. Olahraga.
Akses Media dan Informasi	46. TV berbayar; 47. TV tidak berbayar; 48. Radio; 49. Majalah/koran; 50. Internet; 51. Komputer; 52. CD/DVD/MP3/MP4; 53. Handphone (HP).

Dalam kerangka penelitian ini, kedelapan domain tersebut tetap diperlakukan sebagai indikator pembangunan pemuda dan bukan sebagai ukuran langsung kewarganegaraan. Namun, domain partisipasi pemuda memiliki kedekatan konseptual paling langsung dengan dimensi partisipatif kewarganegaraan aktif, karena mencakup partisipasi organisasi dan kepemimpinan, politik, sosial-keagamaan, serta sosial-kemasyarakatan. Domain hubungan pemuda juga relevan untuk membaca kapasitas relasional warga karena mencakup hubungan dengan orang tua, masyarakat, dan teman. Sementara itu, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, potensi diri, dan akses media informasi terutama dibaca sebagai kondisi yang dapat menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi aktualisasi kapasitas kewarganegaraan. Dengan demikian, interpretasi kewarganegaraan dilakukan pada tahap analisis dan tidak mengubah konstruk asli instrumen pembangunan pemuda menjadi instrumen pengukuran kewarganegaraan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan korelasi product moment antara skor setiap item dengan skor total, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Seluruh 53 item menunjukkan nilai *r* hitung yang lebih besar daripada *r* tabel, sehingga dinyatakan valid secara statistik.

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Nilai alpha pada seluruh domain berada di atas batas minimum 0,60, dengan rentang antara 0,636 hingga 0,829. Nilai tersebut menunjukkan tingkat konsistensi internal instrumen yang dapat diterima untuk penelitian sosial yang bersifat eksploratif.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk memetakan karakteristik responden serta distribusi skor pada masing-masing domain pembangunan pemuda. Kedua, uji one-way ANOVA digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan skor antardaerah. Apabila ditemukan perbedaan yang signifikan, analisis post hoc digunakan untuk mengidentifikasi kelompok wilayah yang menunjukkan perbedaan rata-rata. Penggunaan analisis post hoc tersebut sesuai dengan prosedur analisis pada penelitian awal.

Skor pada masing-masing domain digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan pemuda, sedangkan skor indeks gabungan diperoleh dari rata-rata skor domain. Kategori skor digunakan sebagai alat bantu deskriptif untuk memudahkan interpretasi hasil, dan tidak diperlakukan sebagai klasifikasi normatif atas kualitas kewarganegaraan pemuda.

Dalam artikel ini, hasil pengukuran tersebut selanjutnya dianalisis kembali melalui perspektif kewarganegaraan sosial dan kewarganegaraan aktif. Analisis dilakukan dengan memperhatikan pola capaian antardomain, terutama perbedaan antara domain yang menggambarkan kondisi pendukung dan domain yang lebih langsung berkaitan dengan hubungan pemuda dan partisipasi. Dengan demikian, skor pembangunan pemuda tidak diperlakukan sebagai skor kewarganegaraan, melainkan sebagai dasar empiris untuk mendiskusikan kondisi yang dapat menopang atau membatasi aktualisasi kapasitas kewarganegaraan.

Keterbatasan Metodologis

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis. Pertama, data penelitian berasal dari survei yang dilakukan pada 2013–2014 sehingga tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan kondisi aktual anggota PATRIA. Data tersebut diposisikan sebagai data historis mengenai kondisi pembangunan pemuda minoritas agama pada periode survei dan dianalisis kembali melalui kerangka kewarganegaraan yang berbeda dari penelitian awal.

Kedua, desain potong lintang (cross-sectional) membatasi kemampuan analisis untuk menangkap perubahan kondisi pembangunan pemuda dan praktik kewarganegaraan dari waktu ke waktu. Ketiga, penelitian berfokus pada satu organisasi kepemudaan berbasis agama tanpa melibatkan kelompok pembanding, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan kepada seluruh pemuda Buddhis maupun kelompok pemuda minoritas agama lainnya.

Keempat, instrumen penelitian pada awalnya dikembangkan untuk mengukur pembangunan pemuda, bukan kewarganegaraan. Oleh karena itu, indikator yang digunakan tidak dapat menangkap secara penuh dimensi kewarganegaraan seperti artikulasi klaim hak, advokasi kebijakan, deliberasi politik, maupun pengalaman subjektif kewarganegaraan. Pembacaan kapasitas kewarganegaraan dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat interpretasi analitis berdasarkan pola capaian antardomain.

Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian lanjutan menggunakan data yang lebih mutakhir, desain longitudinal atau pendekatan campuran (mixed methods), serta melibatkan kelompok pembanding. Survei lanjutan terhadap anggota PATRIA juga diperlukan untuk melihat perkembangan kondisi pembangunan pemuda sejak survei 2013–2014 dan memperdalam analisis mengenai praktik kewarganegaraan pemuda minoritas agama.

Kerangka Konseptual

Kewarganegaraan sebagai Praktik Sosial dan Politik

Dalam kajian kontemporer, kewarganegaraan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai status hukum yang melekat pada individu melalui keanggotaan dalam negara. Pendekatan klasik Marshall (1950), yang membagi kewarganegaraan ke dalam hak sipil, politik, dan sosial, telah membuka jalan bagi pemahaman kewarganegaraan sebagai proses historis yang berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial. Namun, pendekatan Marshall kemudian mendapat sejumlah kritik. Turner (1990), misalnya, mengkritik karakter model Marshall yang cenderung uniter dan kurang memberikan perhatian pada perbedaan antara kewarganegaraan yang berkembang secara aktif dari bawah dan kewarganegaraan yang diberikan secara lebih pasif dari atas. Young (1989) mempertanyakan asumsi kewarganegaraan universal yang memperlakukan warga secara sama tanpa cukup memperhitungkan perbedaan posisi sosial dan kelompok; kesetaraan hak formal, menurut perspektif ini, tidak dengan sendirinya menghilangkan ketidaksetaraan dan eksklusi yang dialami kelompok tertentu. Sementara itu, Kymlicka (1995) menunjukkan bahwa dalam masyarakat multikultural, kesetaraan hak individual yang seragam belum tentu memadai untuk mengakomodasi kebutuhan dan posisi kelompok minoritas sehingga pengakuan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan keanggotaan kelompok dapat diperlukan.

Kritik-kritik tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak formal tidak secara otomatis menghasilkan praktik kewarganegaraan yang setara dan inklusif,

khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi marjinal secara sosial, politik, maupun kultural. Dalam masyarakat multikultural, kelompok minoritas sering kali tetap menghadapi hambatan struktural dalam mengakses ruang publik dan partisipasi politik meskipun secara formal memiliki status kewarganegaraan yang sama (Kymlicka, 1995; Yuval-Davis, 2011).

Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut antara lain terlihat dalam pengalaman komunitas Ahmadiyah, yang menunjukkan bahwa jaminan kewarganegaraan formal tidak selalu diikuti oleh kemampuan yang setara untuk memperoleh perlindungan dan menikmati hak-hak kewarganegaraan. Soedirgo (2018), misalnya, menunjukkan bahwa akses warga Ahmadiyah terhadap hak dan perlindungan negara dapat dipengaruhi oleh konfigurasi jaringan politik lokal, sedangkan Mursyidi, Bagir, dan Maarif (2020) memperlihatkan bagaimana posisi minoritas Ahmadiyah di Tasikmalaya menghasilkan pengalaman kewarganegaraan yang tidak sepenuhnya setara. Kajian yang lebih luas mengenai kewarganegaraan minoritas di Indonesia juga menunjukkan adanya persoalan diskriminasi, intimidasi, kekerasan, serta perjuangan memperoleh pengakuan dalam kehidupan sosial-politik (Qodir & Hefner, 2024).

Sejalan dengan kritik tersebut, sejumlah pendekatan teoritis menggeser fokus analisis dari kewarganegaraan sebagai status menuju kewarganegaraan sebagai praktik. Tradisi liberal yang antara lain berakar pada Marshall, menempatkan perlindungan hak individual sebagai fondasi kewarganegaraan. Sementara itu, tradisi republikan memberikan perhatian lebih besar pada keterlibatan aktif warga dalam urusan publik (*public affairs*). Dalam perspektif republikan, warga negara tidak hanya dipandang sebagai pemegang hak yang memperoleh perlindungan dari negara, tetapi juga sebagai aktor yang mengambil bagian dalam kehidupan bersama melalui partisipasi, deliberasi, dan keterlibatan dalam institusi serta komunitas publik (Pettit, 1997; Honohan, 2002). Kewarganegaraan dalam tradisi ini mengandung dimensi partisipatif yang kuat. Kebebasan warga tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap campur tangan, tetapi juga dengan kondisi yang memungkinkan mereka tidak berada di bawah dominasi dan memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam menentukan urusan bersama (Pettit, 1997). Honohan (2002) memperluas pembacaan tersebut dengan menempatkan kewarganegaraan sebagai praktik yang bertumpu pada keterlibatan warga, tanggung jawab terhadap kepentingan bersama, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Dengan demikian, kewarganegaraan republikan berbeda dari pemahaman kewarganegaraan yang semata-mata berpusat pada kepemilikan hak: kualitas

kewarganegaraan juga berkaitan dengan sejauh mana warga memiliki ruang dan kapasitas untuk mengambil bagian dalam pembentukan kehidupan bersama.

Pergeseran dari status menuju praktik juga berkembang dalam kajian kewarganegaraan kontemporer. Isin dan Turner (2007) menunjukkan berkembangnya perhatian terhadap praktik ketika individu dan kelompok membentuk dirinya sebagai subjek kewarganegaraan. Gagasan ini dikembangkan lebih lanjut melalui konsep *acts of citizenship*, yang menempatkan perhatian pada tindakan ketika subjek membentuk dirinya sebagai warga dan mengartikulasikan klaim-klaim kewarganegaraan (Isin, 2008). Perspektif tersebut memungkinkan kewarganegaraan pemuda minoritas dibaca tidak hanya melalui indikator politik formal seperti pemilu, tetapi juga melalui keterlibatan dalam organisasi sosial, pembentukan solidaritas, serta interaksi dalam ruang publik yang plural.

Kerangka tersebut relevan bagi penelitian ini karena organisasi kepemudaan berbasis agama dapat menjadi salah satu ruang tempat kapasitas sosial dan partisipatif warga dibentuk dan dipraktikkan. Namun, keterlibatan dalam organisasi dan komunitas tidak dengan sendirinya menunjukkan kewarganegaraan aktif dalam pengertian republikan. Kewarganegaraan aktif juga menuntut keterhubungan dengan urusan publik yang lebih luas, termasuk kemampuan berpartisipasi dalam proses politik, menyuarakan kepentingan, serta terlibat dalam persoalan yang menyangkut kehidupan bersama.

Dalam konteks negara berkembang, Huntington dan Nelson (1990) menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara tidak berlangsung dalam bentuk dan intensitas seragam. Mereka mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah serta membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Perspektif ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam kehidupan politik perlu dibaca dengan memperhatikan bentuk, derajat, dan konteks partisipasinya.

Dalam penelitian ini, istilah kewarganegaraan aktif tidak digunakan untuk membentuk dikotomi normatif antara warga yang “aktif” dan “pasif”. Perbedaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perbedaan titik tekan dalam tradisi pemikiran kewarganegaraan. Tradisi liberal menempatkan status dan hak individual sebagai basis utama kewarganegaraan. Dalam kerangka ini, warga tetap menjalankan praktik kewarganegaraan, antara lain dengan menggunakan, mempertahankan, dan menuntut pemenuhan haknya, tetapi keterlibatan yang intensif dalam urusan publik tidak menjadi syarat utama kewarganegaraan.

Sebaliknya, tradisi republikan memberikan bobot yang lebih besar pada tindakan warga melalui partisipasi dalam kehidupan publik, deliberasi, serta keterlibatan dalam menentukan kepentingan bersama (Pettit, 1997; Honohan, 2002).

Pergeseran menuju kewarganegaraan sebagai praktik dengan demikian bukanlah pergeseran sederhana dari warga yang “pasif” menjadi “aktif”, melainkan pergeseran lokus analisis dari kepemilikan status dan hak menuju apa yang dilakukan warga melalui tindakan dan partisipasinya. Pendekatan ini sekaligus memberikan kritik terhadap konsepsi kewarganegaraan yang terlalu berpusat pada status legal dan kepemilikan hak, karena kesetaraan formal tidak selalu menjelaskan bagaimana warga memperoleh ruang, kapasitas, dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam konteks penelitian ini, perspektif tersebut memungkinkan kondisi pemuda minoritas dibaca tidak hanya berdasarkan hak yang secara formal mereka miliki, tetapi juga berdasarkan kapasitas dan bentuk keterlibatan mereka dalam organisasi, kehidupan sosial, dan ruang publik.

Pemuda dan Kewarganegaraan: Dari Status ke Kapasitas

Pemuda menempati posisi penting dalam diskursus kewarganegaraan karena kepemilikan status dan hak kewarganegaraan tidak dengan sendirinya menjamin kapasitas yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kemampuan untuk menjalankan hak, berpartisipasi dalam organisasi dan komunitas, serta terlibat dalam urusan publik dipengaruhi oleh berbagai sumber daya dan kondisi yang dimiliki pemuda. Termasuk pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, relasi sosial, dan akses terhadap ruang partisipasi. Dengan demikian, analisis kewarganegaraan pemuda perlu memperhatikan bukan hanya status dan hak yang dimiliki, tetapi juga kapasitas yang memungkinkan hak dan partisipasi tersebut dijalankan.

Pada titik inilah pendekatan *positive youth development* (PYD) menjadi relevan. PYD dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan bagaimana kapasitas pemuda berkembang. Berbeda dengan pendekatan defisit yang terutama melihat pemuda melalui masalah dan perilaku beresiko, PYD menempatkan pemuda sebagai individu yang memiliki potensi untuk mengembangkan kompetensi, hubungan sosial, karakter, kepercayaan diri, dan kontribusi terhadap lingkungan sosialnya (Damon, 2004; Shek & Ma, 2010). Dari perspektif kewarganegaraan, perkembangan tersebut penting, karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan publik memerlukan kapasitas

individual dan sosial yang tidak terbentuk hanya melalui pemberian status dan hak formal sebagai warga negara.

Secara konseptual, PYD dan **Youth Development Index** (YDI) memiliki irisan dalam perhatian keduanya terhadap kondisi dan kapasitas yang mendukung perkembangan pemuda, tetapi keduanya tidak identik dan YDI bukan merupakan operasionalisasi langsung dari pendekatan PYD. PYD merupakan kerangka teoretis yang menjelaskan proses perkembangan positif dan kapasitas pemuda, sedangkan YDI merupakan instrumen pengukuran yang memetakan berbagai dimensi pembangunan pemuda melalui indikator yang dapat diukur. Irisan keduanya terlihat pada perhatian terhadap dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan partisipasi, yang dapat menyediakan atau membatasi sumber daya bagi perkembangan kapasitas pemuda. Dalam penelitian ini, YDI digunakan untuk mengukur kondisi pembangunan pemuda, sedangkan PYD membantu menjelaskan mengapa kondisi tersebut relevan bagi pembentukan kapasitas yang memungkinkan pemuda menjalankan praktik kewarganegaraan.

Namun demikian, pengembangan kapasitas pemuda tidak secara inheren identik dengan kewarganegaraan substantif. Tidak semua bentuk pembangunan pemuda secara otomatis menghasilkan keterlibatan politik atau praktik kewarganegaraan yang inklusif. Oleh karena itu, penggunaan indikator pembangunan pemuda untuk membaca kewarganegaraan memerlukan justifikasi teoretis dan kehati-hatian analitis. Dalam penelitian ini, kapasitas pemuda dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) berkembangnya praktik kewarganegaraan substantif, bukan sebagai ukuran kewarganegaraan itu sendiri, maupun jaminan langsung atas keterlibatan politik yang setara.

Indeks Pembangunan Pemuda dan Kapasitas Kewarganegaraan: Potensi dan Batasan

YDI dikembangkan sebagai instrumen untuk memetakan kondisi pembangunan pemuda melalui berbagai domain kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan akses terhadap informasi (Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, 2011; The Commonwealth, 2013). Sebagai indeks pembangunan pemuda, YDI pada dasarnya tidak dirancang untuk mengukur kewarganegaraan. Namun, sejumlah domain yang diukurnya memiliki relevansi terhadap kondisi yang memungkinkan pemuda menjalankan praktik kewarganegaraan.

Relevansi tersebut tidak berlaku secara sama pada seluruh domain. Partisipasi merupakan domain yang memiliki hubungan paling langsung dengan

dimensi kewarganegaraan aktif, karena menyangkut keterlibatan pemuda dalam organisasi, kehidupan sosial, dan aktivitas politik. Sementara itu, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, relasi sosial, serta akses terhadap informasi lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pendidikan, misalnya, dapat memperluas pengetahuan dan kemampuan warga untuk memahami persoalan publik, sedangkan akses informasi dapat memperbesar kesempatan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kehidupan sosial dan politik. Akan tetapi, tersedianya sumber daya tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan partisipasi atau tindakan kewarganegaraan.

Karena itu, hubungan antara pembangunan pemuda dan kewarganegaraan tidak dapat diasumsikan bersifat linear. Sejumlah indikator dalam instrumen YDI yang digunakan dalam penelitian ini bahkan memiliki jarak konseptual yang cukup jauh dari kewarganegaraan. Indikator kesehatan atau perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan, misalnya, terutama menggambarkan kondisi individual dan pola perilaku pemuda, bukan keterlibatan dalam urusan publik, artikulasi kepentingan, atau klaim atas hak. Skor yang baik pada indikator-indikator tersebut karena itu tidak dapat ditafsirkan secara langsung sebagai tingginya kualitas kewarganegaraan.

Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan YDI secara terbatas untuk memetakan kondisi pembangunan pemuda yang dapat mendukung atau membatasi aktualisasi kapasitas kewarganegaraan. Interpretasi kewarganegaraan terutama diberikan pada domain yang secara konseptual memiliki hubungan lebih dekat dengan praktik kewarganegaraan, khususnya partisipasi pemuda dan hubungan pemuda, sedangkan domain lainnya diperlakukan terutama sebagai kondisi pendukung. Pendekatan ini mempertahankan konstruk asli YDI sebagai ukuran pembangunan pemuda sekaligus memungkinkan hasilnya dibaca secara kritis melalui perspektif kewarganegaraan.

Dalam praktik kebijakan, sejumlah dimensi pembangunan pemuda memiliki keterkaitan konseptual dengan kapasitas kewarganegaraan. Pendidikan, akses terhadap informasi, dan tersedianya ruang partisipasi, contohnya, dapat menyediakan sumber daya dan kesempatan yang memungkinkan pemuda terlibat dalam kehidupan publik. Dalam pengukuran *active citizenship*, partisipasi dalam kehidupan politik, masyarakat sipil, komunitas, serta nilai-nilai yang menopang kehidupan demokratis juga ditempatkan sebagai dementis penting kewarganegaraan aktif (Hoskins & Mascherini, 2009).

Dengan kata lain, kondisi pembangunan pemuda dipandang sebagai fondasi yang memungkinkan terbentuknya kewarganegaraan aktif. Namun demikian, hubungan antara pembangunan pemuda dan praktik kewarganegaraan tidak selalu bersifat linear. Sejumlah indikator dalam YDI—seperti rendahnya perilaku menyimpang atau tingginya akses terhadap media dan informasi—lebih merefleksikan kapasitas individual dan kepatuhan normatif daripada keterlibatan politik atau klaim hak dalam ruang publik. Oleh karena itu, mengasumsikan bahwa peningkatan skor indeks pembangunan pemuda secara otomatis menghasilkan kewarganegaraan yang aktif dapat menimbulkan simplifikasi analitis.

Namun demikian, hubungan antara pembangunan pemuda dan praktik kewarganegaraan tidak selalu bersifat linear. Tidak semua indikator dalam YDI memiliki kedekatan konseptual yang sama dengan kewarganegaraan. Indikator partisipasi memiliki hubungan yang lebih langsung dengan praktik kewarganegaraan, sedangkan indikator seperti kesehatan, akses media dan informasi, maupun perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan lebih tepat dipahami sebagai kondisi individual atau sosial yang dapat mendukung atau membatasi kapasitas pemuda. Oleh karena itu, peningkatan skor indeks pembangunan pemuda tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai peningkatan kualitas kewarganegaraan aktif.

Dalam penelitian ini, YDI diperlakukan bukan sebagai ukuran langsung kewarganegaraan, melainkan sebagai perangkat yang memungkinkan pembacaan terbatas terhadap kondisi yang berkaitan dengan kapasitas kewarganegaraan pemuda. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa praktik kewarganegaraan tidak hanya bergantung pada kepemilikan hak format, tetapi juga pada kapasitas dan sumber daya yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam kehidupan publik. Putnam (2000) menunjukkan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan resiprositas sebagai modal yang memfasilitasi koordinasi dan tindakan kolektif, sedangkan [Hoskins & Mascherini, \(2009\)](#). menempatkan partisipasi dalam kehidupan politik, masyarakat sipil, dan komunitas sebagai komponen penting *active citizenship*. Dari perspektif kapabilitas, Sen (1999) juga menekankan perbedaan antara kepemilikan sumber daya dan kemampuan aktual individu untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi kesempatan untuk bertindak.

Atas dasar itu, domain partisipasi pemuda memiliki hubungan paling langsung dengan kewarganegaraan aktif, sedangkan hubungan pemuda dapat dibaca sebagai bagian dari sumber daya relasional yang menopang keterlibatan sosial. Domain pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, potensi diri, dan akses media

informasi lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang dapat memperluas atau membatasi kapasitas pemuda untuk berpartisipasi. Dengan demikian, capaian pada domain-domain tersebut tidak diperlakukan sebagai ukuran kewarganegaraan itu sendiri, melainkan sebagai kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) praktik kewarganegaraan.

Atas dasar itu, YDI dalam penelitian ini tetap diposisikan sebagai instrumen untuk mengukur kondisi pembangunan pemuda, bukan sebagai ukuran kewarganegaraan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dibaca melalui kerangka kewarganegaraan untuk menganalisis sejauh mana kondisi pembangunan pemuda dapat menyediakan atau membatasi kapasitas bagi praktik kewarganegaraan. Pembacaan tersebut dilakukan secara berbeda pada setiap domain sesuai dengan kedekatan konseptualnya dengan kewarganegaraan, tanpa mengasumsikan hubungan langsung antara skor pembangunan pemuda dan kualitas kewarganegaraan.

Organisasi Keagamaan Minoritas sebagai Arena Kewarganegaraan

Organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam pembentukan kapasitas dan praktik kewarganegaraan. Keterlibatan dalam organisasi menyediakan ruang bagi individu untuk membangun jaringan sosial, kepercayaan, resiprositas, dan pengalaman bekerja bersama yang dapat menopang partisipasi dalam kehidupan publik (Putnam, 2000). Dalam perspektif ini, organisasi tidak hanya menjadi wadah aktivitas sosial, tetapi juga dapat menjadi arena tempat individu belajar berorganisasi, membangun hubungan sosial, dan mengembangkan kapasitas untuk bertindak secara kolektif.

Namun hubungan antara keterlibatan organisasi dan kewarganegaraan tidak selalu menghasilkan pola yang sama. Putnam (2000) membedakan antara *bonding social capital*, yang memperkuat ikatan dan solidaritas di antara anggota kelompok yang relatif homogen, dengan *bridging social capital*, yang membangun hubungan melintasi kelompok sosial yang berbeda. Bonding social capital dapat menyediakan dukungan, rasa memiliki, dan solidaritas internal yang penting bagi suatu komunitas, sedangkan bridging social capital memperluas jaringan dan hubungan dengan kelompok lain. Dalam organisasi berbasis identitas, termasuk organisasi keagamaan, kedua bentuk modal sosial tersebut dapat berkembang secara bersamaan ataupun dalam derajat yang berbeda (Putnam, 2000; Wuthnow, 2002).

Bagi kelompok minoritas agama, fungsi organisasi tersebut memiliki arti khusus karena organisasi dapat menyediakan ruang bagi pembentukan identitas

kolektif, solidaritas internal, dan kapasitas organisasional sekaligus menjadi penghubung antara komunitas keagamaan dan lingkungan sosial yang lebih luas. Namun, kuatnya kohesi internal tidak dengan sendirinya menghasilkan keterlibatan yang lebih luas dalam kehidupan publik. Karena itu, secara analitis perlu dibedakan antara kapasitas yang berkembang di dalam komunitas dan aktualisasinya dalam relasi lintas kelompok serta partisipasi dalam urusan publik.

Kerangka tersebut relevan untuk membaca Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA). Sebagai organisasi kepemudaan berbasis agama minoritas, PATRIA dapat dipahami sebagai salah satu arena tempat anggotanya membangun relasi sosial, pengalaman berorganisasi, dan partisipasi sosial-keagamaan. Namun, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa keanggotaan dalam PATRIA dengan sendirinya menghasilkan kewarganegaraan aktif. Pertanyaan empirisnya justru terletak pada sejauh mana kapasitas yang terbentuk melalui kehidupan organisasi berkaitan dengan keterlibatan sosial dan partisipasi yang melampaui lingkungan internal organisasi. Dengan menempatkan PATRIA sebagai studi kasus, penelitian dapat menganalisis hubungan antara pembangunan pemuda, kehidupan organisasi keagamaan minoritas, dan kapasitas kewarganegaraan tanpa menyamakan ketiganya.

Kewarganegaraan Selektif Pemuda Minoritas: Kapasitas, Praktik, dan Batasannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa YDI anggota Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) berada pada kategori “tinggi” dengan skor rata-rata 73,3. Temuan ini mengindikasikan bahwa, sebagai kelompok pemuda minoritas agama, anggota PATRIA memiliki kapasitas individual dan sosial yang relatif baik, terutama dalam aspek pendidikan, akses informasi, serta keterlibatan organisasi. Namun, dalam kerangka kewarganegaraan, capaian tersebut tidak dapat dibaca secara linear sebagai indikator kewarganegaraan substantif yang utuh.

Sejalan dengan kritik Isin dan Turner (2007), kewarganegaraan tidak semata ditentukan oleh tingkat kesejahteraan, kepatuhan normatif, atau kapasitas individual, melainkan oleh praktik partisipasi dalam ruang publik serta kemampuan aktor untuk menegosiasikan hak dan tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks ini, indeks pembangunan pemuda dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai ukuran kapasitas kewarganegaraan potensial, bukan sebagai realisasi kewarganegaraan secara penuh.

Salah satu temuan kunci adalah adanya variasi dalam bentuk partisipasi pemuda. Domain partisipasi mencapai skor 73,3 dan termasuk kategori tinggi,

tetapi capaian tersebut tidak terdistribusi secara sama pada seluruh indikator. Penelitian awal mengidentifikasi partisipasi politik sebagai indikator yang paling membatasi capaian domain tersebut. Sebagai contoh, penelitian awal mencatat bahwa PATRIA pada periode survei tidak terlibat dalam pergerakan sosial kebangsaan, sementara aktivitas organisasi lebih berfokus pada gerakan sosial-keagamaan. Temuan ini tidak berarti bahwa partisipasi sosial-keagamaan berada di luar praktik kewarganegaraan. Dalam tradisi kewarganegaraan republikan, keterlibatan warga dalam urusan publik tidak terbatas pada politik formal, tetapi juga mencakup partisipasi dalam kehidupan komunitas dan berbagai bentuk tindakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama (Pettit, 1997; Honohan, 2002). Dengan demikian, kegiatan sosial-keagamaan PATRIA dapat dibaca sebagai salah satu arena keterlibatan kewarganegaraan sejauh kegiatan tersebut berhubungan dengan kehidupan sosial dan kepentingan publik, meskipun tidak diwujudkan melalui politik formal.

Pola ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai kewarganegaraan selektif, yakni kondisi di mana pemuda aktif dalam ruang sosial yang aman dan bermakna secara identitas, tetapi relatif pasif dalam ranah politik formal. Selektivitas ini tidak semata merupakan pilihan individual, melainkan terbentuk melalui interaksi antara preferensi aktor, norma organisasi, dan struktur peluang politik yang dihadapi kelompok minoritas agama. Mengacu pada Huntington dan Nelson (1990), keterbatasan partisipasi politik formal tersebut tidak dapat secara simplistik ditafsirkan sebagai apatisme politik. Bagi pemuda minoritas agama, keterlibatan yang terbatas dalam politik formal justru dapat berfungsi sebagai strategi adaptif untuk menghindari konflik, stigmatisasi, atau eksklusi dalam ruang publik yang belum sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, kewarganegaraan yang dipraktikkan anggota PATRIA lebih bersifat sosial-moral dibandingkan politik-deliberatif.

Pola pada domain hubungan pemuda perlu dibaca secara lebih hati-hati. Skor 60 menunjukkan bahwa capaian domain tersebut relatif lebih rendah dibandingkan beberapa domain lainnya. Namun, indikator yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup hubungan dengan orang tua, masyarakat, dan teman. Karena itu, data penelitian tidak memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan kuat atau lemahnya hubungan lintas komunitas maupun untuk membedakan secara empiris antara bonding dan bridging social capital. Konsep bonding dan bridging social capital (Putnam, 2000) tetap relevan untuk memahami pentingnya jaringan sosial dalam kehidupan kewarganegaraan, tetapi pembedaan tersebut tidak diukur secara langsung dalam penelitian ini.

Dalam perspektif kewarganegaraan multikultural (Kymlicka, 1995); posisi kelompok minoritas penting diperhitungkan karena kesetaraan hak individual secara formal tidak selalu cukup untuk menjamin kemampuan kelompok minoritas mempertahankan identitas sekaligus berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Dalam konteks penelitian ini, perspektif tersebut membantu menempatkan keterlibatan pemuda PATRIA dalam kegiatan sosial-keagamaan bukan sebagai praktik yang berada di luar kewarganegaraan, melainkan sebagai salah satu bentuk keterlibatan sosial yang dapat memiliki dimensi kewarganegaraan ketika berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan publik. Namun, karena penelitian ini tidak secara langsung mengukur relasi lintas agama, pengalaman diskriminasi, ataupun proses negosiasi identitas minoritas dalam ruang publik, hubungan antara posisi minoritas dan pola keterlibatan tersebut tidak dapat disimpulkan secara kausal dari data yang tersedia.

Dimensi ekonomi juga relevan dalam pembacaan kewarganegaraan substantif. Dalam penelitian ini, kewarganegaraan substantif dipahami sebagai kondisi ketika kewarganegaraan tidak berhenti pada kepemilikan status dan hak secara formal, tetapi disertai kemampuan nyata untuk menikmati hak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan publik. Pengertian ini bertolak dari konsepsi kewarganegaraan sosial Marshall (1950), yang menempatkan hak sosial sebagai bagian dari kondisi yang memungkinkan warga berpartisipasi sebagai anggota masyarakat secara penuh, serta kritik yang menunjukkan bahwa kesetaraan status dan hak formal tidak dengan sendirinya menghasilkan pengalaman kewarganegaraan yang setara (Turner, 1990; Young, 1989). Dalam konteks PATRIA, domain tenaga kerja memperoleh skor 60, tetapi capaian tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kerentanan ekonomi karena sebagian responden yang belum bekerja masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Penelitian awal menunjukkan bahwa salah satu aspek yang masih terbatas adalah aktivitas pelatihan kewirausahaan. Karena itu, kondisi ekonomi dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai salah satu sumber daya yang dapat menopang atau membatasi kapasitas bagi praktik kewarganegaraan, bukan sebagai ukuran langsung kewarganegaraan substantif.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara pembangunan pemuda dan kewarganegaraan tidak bersifat otomatis ataupun linier. Indeks pembangunan pemuda digunakan untuk memetakan kondisi pembangunan yang dapat menyediakan atau membatasi sumber daya bagi kapasitas dan praktik kewarganegaraan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran kewarganegaraan itu sendiri. Instrumen tersebut memiliki keterbatasan

dalam menangkap praktik kewarganegaraan sebagai proses yang bersifat politik, relasional, dan kontekstual. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada studi kewarganegaraan dengan menunjukkan kemungkinan sekaligus batas penggunaan indikator pembangunan pemuda untuk membaca kondisi yang memungkinkan (enabling conditions) praktik kewarganegaraan, khususnya dalam konteks pemuda minoritas agama.

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan pentingnya memperluas kesempatan bagi pemuda dalam berbagai bentuk keterlibatan publik. Penguatan literasi kewarganegaraan, dialog lintas kelompok, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi ruang bagi pengembangan keterlibatan tersebut. Dalam konteks ini, pola kewarganegaraan selektif tidak menunjukkan adanya dikotomi antara partisipasi sosial dan politik, melainkan menggambarkan bahwa kapasitas dan keterlibatan kewarganegaraan dapat teraktualisasi dengan intensitas yang berbeda pada berbagai ranah kehidupan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Analisis dilakukan terhadap 211 responden anggota Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) yang berasal dari populasi sekitar 2.100 anggota aktif yang tersebar di 19 provinsi. Karakteristik responden memberikan konteks penting bagi pembacaan hasil indeks karena menunjukkan profil sosial-demografis kelompok yang dianalisis. Dalam penelitian awal, karakteristik tersebut mencakup jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, dan usia.

Tabel 2. Karakteristik Responden PATRIA

Karakteristik	Kategori	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	132	63
	Perempuan	79	37
Pendidikan	SD	0	0
	SMP	5	2
	SMA/SMU	50	24
	Perguruan Tinggi	156	74
Status perkawinan	Belum menikah	178	84
	Sudah menikah	33	16

Komposisi responden menunjukkan dominasi laki-laki sebesar 63 persen dan perempuan sebesar 37 persen. Tingkat pendidikan responden relatif tinggi: 74

persen berada pada jenjang perguruan tinggi dan 24 persen SMA/SMU, sedangkan hanya 2 persen berpendidikan SMP dan tidak terdapat responden berpendidikan SD. Sebagian besar responden belum menikah (84 persen), sementara berdasarkan status pekerjaan 55 persen telah bekerja dan 45 persen belum bekerja.

Mayoritas responden berada pada kelompok usia 16–30 tahun, yakni sebanyak 188 responden (89,1%). Sementara itu, 4 responden (1,9%) berusia di bawah 16 tahun dan 19 responden (9,0%) berusia di atas 30 tahun.

Karakteristik tersebut penting dalam interpretasi hasil. Tingginya proporsi responden dengan pendidikan perguruan tinggi, misalnya, perlu diperhitungkan ketika membaca tingginya capaian domain pendidikan dan akses informasi. Demikian pula, status belum bekerja tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai pengangguran karena sebagian responden masih berstatus pelajar atau mahasiswa, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian awal.

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda PATRIA

Pengukuran terhadap delapan domain menghasilkan indeks gabungan sebesar 73,3 pada skala 0–100. Dalam kategorisasi yang digunakan dalam penelitian awal, skor tersebut termasuk kategori tinggi dan berada mendekati batas kategori sangat tinggi. Dua domain dengan skor tertinggi adalah pendidikan dan akses media informasi, masing-masing sebesar 76,6. Sebaliknya, potensi diri, tenaga kerja, dan hubungan pemuda memperoleh skor terendah, masing-masing sebesar 60.

Tabel 3. Skor Indeks Pembangunan Pemuda PATRIA Berdasarkan Domain

Domain	Skor rata-rata (maks. 3)	Indeks (0-100)	Kategori
Potensi diri	1,8	60,0	Tinggi
Pendidikan	2,3	76,6	Sangat tinggi
Perilaku menyimpang	2,1	70,0	Tinggi
Tenaga kerja	1,8	60,0	Tinggi
Hubungan pemuda	1,8	60,0	Tinggi
Kesehatan	2,1	70,0	Tinggi
Akses media dan informasi	2,3	76,6	Sangat tinggi
Partisipasi pemuda	2,2	73,3	Tinggi
Indeks PATRIA	2,2	73,3	Tinggi

Kategori mengikuti skala penelitian awal: rendah 0–25, sedang 25–50, tinggi 50–75, dan sangat tinggi 75–100. Tesis menempatkan indeks gabungan 73,3 dalam kategori tinggi tetapi mendekati batas sangat tinggi.

Pola antardomain tersebut lebih informatif bagi penelitian ini daripada skor agregat 73,3 semata. Pendidikan dan akses media informasi menunjukkan capaian tertinggi. Dalam penelitian awal, capaian pendidikan masih dipengaruhi oleh variasi dalam aktivitas membaca, pelatihan, dan pendidikan keagamaan, sedangkan pada akses media informasi terdapat keterbatasan tertentu terutama pada akses televisi berbayar di wilayah perdesaan.

Domain partisipasi pemuda memperoleh skor 73,3. Domain ini mempunyai arti khusus bagi analisis kewarganegaraan karena terdiri atas partisipasi politik, kepemimpinan, sosial-kemasyarakatan, dan sosial-keagamaan. Penelitian awal mengidentifikasi partisipasi politik sebagai indikator yang paling membatasi capaian domain tersebut serta mencatat bahwa aktivitas PATRIA pada periode penelitian lebih berfokus pada gerakan sosial-keagamaan.

Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa tingginya skor partisipasi secara agregat tidak berarti bahwa seluruh bentuk partisipasi berkembang pada tingkat yang sama. Dalam perspektif kewarganegaraan yang digunakan artikel ini, perbedaan internal tersebut menjadi lebih relevan dibandingkan skor partisipasi secara keseluruhan.

Sebaliknya, tiga domain memperoleh skor relatif paling rendah, yaitu potensi diri, tenaga kerja, dan hubungan pemuda, masing-masing sebesar 60. Khusus domain tenaga kerja, hasil tersebut harus dibaca secara hati-hati. Penelitian awal menjelaskan bahwa sebagian responden yang belum bekerja masih berstatus pelajar atau mahasiswa sehingga tidak dapat seluruhnya diperlakukan sebagai pengangguran dalam pengertian substantif. Di sisi lain, aktivitas pelatihan kewirausahaan ditemukan masih sangat terbatas.

Domain hubungan pemuda juga memperoleh skor 60. Akan tetapi, instrumen domain ini hanya mengukur hubungan dengan orang tua atau keluarga, teman, dan masyarakat. Oleh karena itu, skor tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai ukuran langsung hubungan lintas agama atau lintas komunitas, dan juga tidak cukup untuk menyimpulkan kuat-lemahnya *bridging social capital*. Pembatasan interpretasi ini penting untuk menjaga konsistensi antara konstruk instrumen dan pembahasan kewarganegaraan.

Variasi Regional Capaian Pembangunan Pemuda

Selain menunjukkan variasi antardomain, penelitian menemukan adanya variasi capaian menurut provinsi. Uji ***one-way ANOVA*** menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik pada seluruh domain yang dianalisis. Hasil

ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan pemuda PATRIA tidak homogen secara geografis.

Tabel 4. Hasil Uji ANOVA Perbedaan Skor Domain Antarprovinsi

Domain	F	p	Keputusan
Potensi diri	3,954	< 0,001	Signifikan
Pendidikan	4,246	< 0,001	Signifikan
Perilaku menyimpang	2,495	0,001	Signifikan
Tenaga kerja	3,055	< 0,001	Signifikan
Hubungan pemuda	4,940	< 0,001	Signifikan
Kesehatan	2,810	< 0,001	Signifikan
Akses media dan informasi	2,240	0,003	Signifikan
Partisipasi pemuda	4,945	0,001	Signifikan

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa seluruh domain memiliki nilai $p < 0,05$. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antarprovinsi pada domain potensi diri, pendidikan, perilaku menyimpang, tenaga kerja, hubungan pemuda, kesehatan, akses media dan informasi, serta partisipasi pemuda. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan pemuda PATRIA bervariasi menurut wilayah, tetapi tidak menjelaskan faktor yang menyebabkan variasi tersebut.

Secara deskriptif, penelitian awal menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pola capaian yang sepenuhnya seragam pada semua wilayah. Jawa Timur relatif sering menempati posisi rendah pada beberapa domain, sedangkan Jambi relatif sering berada pada posisi tinggi. Untuk domain partisipasi pemuda, Sulawesi Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan berada pada kelompok rata-rata tertinggi, sedangkan Jawa Timur berada pada posisi terendah.

Namun, hasil ANOVA tersebut perlu dibaca sebatas menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antardaerah, bukan sebagai bukti bahwa sampel secara otomatis representatif terhadap seluruh populasi. Selain itu, karena ukuran sampel pada masing-masing provinsi berbeda dan beberapa kelompok relatif kecil, variasi regional lebih tepat diperlakukan sebagai temuan internal penelitian daripada dasar untuk membuat generalisasi mengenai karakter pemuda Buddhis pada masing-masing provinsi.

Dari Pembangunan Pemuda ke Kapasitas Kewarganegaraan

Skor gabungan sebesar 73,3 menunjukkan bahwa kondisi pembangunan pemuda anggota PATRIA pada periode penelitian secara umum berada pada kategori tinggi.

Namun, sesuai dengan kerangka analitis penelitian, capaian tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai skor kewarganegaraan. YDI mengukur kondisi pembangunan pemuda, sementara relevansinya terhadap kewarganegaraan terletak pada sejauh mana kondisi tersebut menyediakan sumber daya dan kesempatan yang memungkinkan pemuda menggunakan hak serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan publik.

Pola antardomain memperlihatkan alasan perbedaan tersebut. Pendidikan dan akses media informasi mencapai 76,6, sementara partisipasi mencapai 73,3. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya pendidikan dan informasi yang relatif tinggi tidak menghasilkan pola capaian yang identik pada seluruh ranah partisipasi. Lebih penting lagi, di dalam domain partisipasi sendiri terdapat perbedaan antara bentuk keterlibatan sosial-keagamaan dan politik. Penelitian awal secara eksplisit menyebut partisipasi politik sebagai faktor yang menahan capaian domain partisipasi, sementara aktivitas PATRIA lebih terkonsentrasi pada kegiatan sosial-keagamaan.

Temuan ini mendukung argumentasi konseptual artikel bahwa pembangunan pemuda merupakan enabling condition bagi praktik kewarganegaraan, bukan kewarganegaraan itu sendiri. Sumber daya pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi, dan relasional dapat memperbesar kapasitas pemuda untuk terlibat dalam kehidupan publik, tetapi aktualisasinya bergantung pada bentuk dan ruang partisipasi yang tersedia.

Kewarganegaraan Selektif Pemuda Minoritas: Kapasitas, Praktik, dan Batasannya

Istilah “kewarganegaraan selektif” dalam penelitian ini digunakan sebagai kategori analitis untuk menggambarkan ketidakmerataan aktualisasi kapasitas dan praktik kewarganegaraan pada berbagai ranah kehidupan. “Selektif” dalam pengertian ini tidak merujuk pada seleksi status kewarganegaraan oleh negara, melainkan pada pola ketika kapasitas dan keterlibatan pemuda berkembang relatif kuat pada ranah tertentu tetapi lebih terbatas pada ranah lainnya. Pengertian ini bertolak dari perbedaan antara kondisi yang memungkinkan partisipasi dan praktik kewarganegaraan itu sendiri, serta dari literatur yang menempatkan tindakan, partisipasi, dan keterlibatan dalam urusan publik sebagai dimensi penting kewarganegaraan (Pettit, 1997; Honohan, 2002; Isin, 2008).

Pola empiris PATRIA memberikan dasar bagi pembacaan tersebut. Indeks pembangunan pemuda secara keseluruhan mencapai 73,3 dan berada pada kategori tinggi, dengan capaian sangat tinggi pada pendidikan dan akses media

informasi. Namun, capaian tersebut tidak terdistribusi secara seragam pada seluruh domain maupun indikator. Secara khusus, domain partisipasi mencapai 73,3, tetapi penelitian awal mengidentifikasi partisipasi politik sebagai indikator yang paling membatasi capaian domain tersebut, sementara aktivitas organisasi lebih berfokus pada kegiatan sosial-keagamaan. Dengan demikian, kapasitas partisipatif yang relatif kuat tidak teraktualisasi dengan intensitas yang sama pada seluruh ranah partisipasi.

Ketimpangan tersebut tidak tepat dibaca sebagai dikotomi sederhana antara warga yang “aktif” dan “pasif”. Mengacu pada Huntington dan Nelson (1990), partisipasi politik perlu dipahami berdasarkan bentuk, derajat, dan konteks keterlibatannya. Dalam kasus PATRIA, data menunjukkan orientasi partisipasi yang lebih kuat pada ranah sosial-keagamaan dibandingkan politik. Namun, karena instrumen tidak mengukur secara langsung motivasi responden untuk terlibat atau tidak terlibat dalam politik, penelitian ini tidak dapat menentukan apakah pola tersebut merupakan pilihan individual, pengaruh norma organisasi, strategi adaptif sebagai kelompok minoritas, atau akibat struktur kesempatan politik. Faktor-faktor tersebut lebih tepat diposisikan sebagai kemungkinan penjelasan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Pola serupa perlu dibaca secara hati-hati pada domain hubungan pemuda. Skor 60 menunjukkan bahwa domain tersebut relatif lebih rendah dibandingkan pendidikan, akses media informasi, dan partisipasi. Akan tetapi, karena indikatornya terbatas pada hubungan dengan orang tua atau keluarga, teman, dan masyarakat, penelitian ini tidak memiliki dasar empiris untuk menyimpulkan bahwa anggota PATRIA memiliki hubungan lintas komunitas yang rendah ataupun bahwa modal sosial mereka secara dominan bersifat *bonding*. Konsep *bonding* dan *bridging social capital* (Putnam, 2000) tetap berguna sebagai kerangka untuk memahami pentingnya perluasan jaringan sosial, tetapi pembedaan keduanya tidak diukur secara langsung dalam survei ini.

Dimensi ekonomi juga menunjukkan keterbatasan pada kondisi pembangunan pemuda. Domain tenaga kerja memperoleh skor 60, tetapi capaian tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai kerentanan ekonomi karena sebagian responden yang belum bekerja masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Penelitian awal justru menunjukkan bahwa salah satu aspek yang masih terbatas adalah aktivitas pelatihan kewirausahaan. Dalam perspektif kewarganegaraan sosial Marshall (1950), kondisi ekonomi tetap relevan sebagai salah satu sumber daya yang memungkinkan warga menikmati hak dan berpartisipasi secara lebih penuh dalam kehidupan sosial dan publik.

Dengan demikian, “kewarganegaraan selektif” dalam penelitian ini terutama merujuk pada ketidakmerataan aktualisasi kapasitas dan keterlibatan antarranah, bukan pada penilaian normatif terhadap anggota PATRIA. Bukti empiris terkuat bagi pola tersebut terdapat pada domain partisipasi: keterlibatan sosial-keagamaan relatif menonjol, sementara partisipasi politik menjadi aspek yang membatasi capaian domain. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan batas penggunaan indeks pembangunan pemuda dalam studi kewarganegaraan. Indeks dapat memetakan kondisi dan kapasitas yang memungkinkan praktik kewarganegaraan, tetapi tidak sepenuhnya menangkap motivasi, artikulasi klaim hak, deliberasi, pengalaman minoritas, ataupun proses politik yang menentukan bagaimana kapasitas tersebut diwujudkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kondisi pembangunan pemuda Buddhis Theravada yang tergabung dalam Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) dan membaca implikasinya terhadap kapasitas kewarganegaraan. Berdasarkan analisis sekunder terhadap data survei 2013–2014, indeks pembangunan pemuda PATRIA mencapai 73,3 pada skala 0–100 dan berada pada kategori tinggi. Pendidikan dan akses media informasi memperoleh capaian tertinggi, masing-masing 76,6, sedangkan potensi diri, tenaga kerja, dan hubungan pemuda memperoleh capaian terendah, masing-masing 60. Hasil ANOVA juga menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antarprovinsi pada seluruh domain yang dianalisis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa capaian pembangunan pemuda tidak dapat secara langsung diperlakukan sebagai ukuran kualitas kewarganegaraan. Pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, relasi sosial, dan akses informasi lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang dapat menyediakan atau membatasi sumber daya bagi praktik kewarganegaraan. Domain partisipasi memiliki hubungan konseptual yang lebih langsung dengan kewarganegaraan aktif. Meskipun domain ini mencapai skor 73,3, penelitian awal mengidentifikasi partisipasi politik sebagai indikator yang paling membatasi capaiannya dan mencatat bahwa aktivitas PATRIA pada periode penelitian lebih berfokus pada kegiatan sosial-keagamaan.

Ketidakmerataan tersebut menjadi dasar bagi penggunaan istilah “kewarganegaraan selektif” dalam penelitian ini. Istilah tersebut tidak merujuk pada seleksi status kewarganegaraan ataupun penilaian normatif antara warga yang aktif dan pasif, melainkan pada ketidakmerataan aktualisasi kapasitas dan keterlibatan pada berbagai ranah kehidupan. Dalam kasus PATRIA, bukti empiris paling jelas terlihat pada domain partisipasi, ketika capaian partisipasi

secara agregat relatif tinggi tetapi partisipasi politik tetap menjadi indikator yang membatasi capaian domain tersebut.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan perlunya membedakan pembangunan pemuda, kapasitas kewarganegaraan, dan praktik kewarganegaraan. Indeks pembangunan pemuda dapat digunakan untuk memetakan kondisi yang dapat menopang atau membatasi kapasitas bagi praktik kewarganegaraan, tetapi tidak dapat menggantikan pengukuran kewarganegaraan itu sendiri. Instrumen penelitian tidak mengukur secara langsung artikulasi klaim hak, deliberasi politik, motivasi partisipasi, pengalaman sebagai kelompok minoritas, ataupun proses yang menentukan bagaimana kapasitas tersebut diwujudkan dalam kehidupan publik.

Karena itu, temuan penelitian ini harus dibaca dalam konteks PATRIA pada periode survei 2013–2014 dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi anggota PATRIA saat ini ataupun digeneralisasikan kepada seluruh pemuda Buddhis di Indonesia. Penelitian selanjutnya memerlukan data yang lebih mutakhir serta instrumen yang secara khusus mengukur praktik dan pengalaman kewarganegaraan untuk menguji lebih lanjut hubungan antara pembangunan pemuda, posisi minoritas agama, dan aktualisasi kapasitas kewarganegaraan.

Referensi

- Arendt, H 1998, *The Human Condition*, University of Chicago Press, Chicago.
- Agio, DD, Cenningham, W, Collier, S, Borges, VC & Leon, JS 2007, 'Youth well-being in Brazil: an index for cross regional comparison,' World Bank Group, Washington, DC. Diakses 17 Juli 2025. Tersedia di: (<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7005/wps4189.pdf?sequence=1>).
- Arnett, JJ 2019, *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties (2nd edition)*, Oxford University Press, London. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199929382.001.0001>.
- Bogdan, R & Taylor, SJ 2004, Metode penelitian kualitatif, diterjemahkan oleh Lexi J. Moleong, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Chaaban, JM 2009, 'Measuring youth development: a nonparametric cross country "Youth Welfare Index"', *Social Indicators Research*, Vol. 91, No. 2, pp. 305–325. Diakses 17 Maret 2025. Tersedia di: (<http://www.jstor.org/stable/27734936>).

- Commonwealth, The 2013, *The Youth Development Index results report 2013*, London: Commonwealth Secretariat, London. Tersedia di: http://www.youthdevelopmentindex.org/cms/cms-youth/_images/197918019952385f3219c75.pdf (Accessed: 19 March 2014).
- Creswell, JW 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Fawaid, A (penerj.), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Crow, L & Crow, A 2005, *Education psychology*, diterjemahkan oleh Abd. Rachman Abror, *Psikologi pendidikan*, Nur Cahya, Yogyakarta.
- Damon, W 2004, 'What is positive youth development?', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 591, No. 1, pp. 13–24. Diakses 13 April 2025 (Tersedia di: <http://www.jstor.org/stable/4127632>).
- Danim, S 1995, *Transformasi sumber daya manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fuller, RD, Percy, VE, Bruening, JE & Cotrufo, RJ 2013, 'Positive youth development: minority male participation in a sport-based afterschool program in an urban environment', *Research Quarterly for Exercise and Sport*, Vol. 84, No. 4, pp. 469–482. Diakses 16 April 2025. Tersedia di: (<http://search.proquest.com/docview/1490685874>).
- Huntington, SP & Nelson, JM 1990, *No easy choice: political participation in developing countries*. Diterjemahkan oleh Simamora, S., *Partisipasi politik di negara berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hurlock, EB 1980, *Developmental psychology*, Istiwidayanti dan Soedjarwo (penerj.), *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Erlangga, Jakarta.
- Isman, H 1996, *Pemuda pembangunan dan masa depan*, Kemenpora RI, Jakarta.
- Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 2011, *Domain and indicators in Malaysia Youth Index*, Malaysia Institute for Research in Youth Development, Kuala Lumpur.
- Latif, Y 2011, *Pancasila paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lickona, T 2004, *Character matters: how to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*, Simon & Schuster, New York.
- Lister, R. 2007, 'Why citizenship: Where, when and how children?', *Theoretical Inquiries in Law*, vol. 8, no. 2.

- Moerdiyanto, D 2014, 'Pembangunan kepemimpinan pemuda berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air', Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Diakses 15 April 2025. (Tersedia di: <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/drs-moerdiyanto-mpd/artikel-pengemb-kepemimpinan-pemuda-moer.pdf>).
- Notoatmodjo, S 2009, *Pengembangan sumber daya manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyatno, D 2013, *Olah data statistik dengan program PSPP*, Mediakom, Jakarta.
- Robbins, SP & Judge, TA 2011, *Perilaku organisasi*, Angelica, D. et al. (penerj.), Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso, S 2014, *Statistik parametrik: konsep dan aplikasi dengan SPSS*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Shek, DTL & Ma, CMS 2010, 'Dimensionality of the Chinese Positive Youth Development Scale: confirmatory factor analyses', *Social Indicators Research*, Vol. 98, No. 3, pp. 465–485. Diakses 13 April 2025. (Tersedia di: <http://www.jstor.org/stable/40783450>).
- Singarimbun, M & Efendi, S (eds.) 1995, *Metode penelitian survei*, LP3ES, Jakarta.
- Supranto, J 1992, *Teknik sampling untuk survei dan eksperimen*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyanto, J 2009, Analisis pembangunan pemuda Indonesia (Studi indikator pembangunan pemuda Indonesia), Thesis, Universitas Indonesia.
- Sugiyono 2010, *Statistik untuk penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- UNDP 2013, *Human Development Report 2013: the rise of the South*, United Nations Development Programme, New York.
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, *Statistik pemuda Indonesia 2012*, BPS, Jakarta. Diakses 22 Juli 2025. (Tersedia: http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/stat_pemuda_2012/index3.php?pub=Statistik%20Pemuda%20Indonesia%202012).
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, *Jumlah penduduk miskin Maret 2013*, BPS, Jakarta. Diakses 20 Maret 2025. (Tersedia di: <http://www.bps.go.id/?news=1023>).
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 2010–2014, *Rencana strategis Kemenpora 2010–2014*, Kemenpora, Jakarta. Diakses 19 Juni 2025. (Tersedia di: http://www.kemenpora.go.id/news/RENSTRA_KEMENPORA_2010-2014.pdf).

- Mursyidi, A. F., Bagir, Z. A., & Maarif, S. (2020). "Homo Sacer: Ahmadiyya and Its Minority Citizenship (A Case Study of Ahmadiyya Community in Tasikmalaya)." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 5(2), 191–204. DOI: 10.15575/jw.v5i2.9402.
- Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA) 2014, Mengenal PATRIA. Diakses 20 Mei 2025. (Tersedia di: <http://www.patria.or.id/baru/index.php/2012-12-26-06-07-35/mengenal-patria>).
- Pfister, T. 2012, 'Citizenship and capability? Amartya Sen's capabilities approach from a citizenship perspective', *Citizenship Studies*, vol. 16, no. 2, pp. 241–254.
- Qodir, Z., & Hefner, R. W. (2024). "Minority, Cultural Citizenship, and Indonesian Islam: Challenges in a Pluralistic Society." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 14(2), 409–439. DOI: 10.18326/ijims.v14i2.409-439.
- Republik Indonesia 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Soedirgo, J. (2018). "Informal networks and religious intolerance: how clientelism incentivizes the discrimination of the Ahmadiyah in Indonesia." *Citizenship Studies*, 22(2), 191–207. DOI: 10.1080/13621025.2018.1445490. Studi ini secara eksplisit menggunakan gagasan restricted citizenship untuk menjelaskan pengalaman Ahmadiyah.